

**PROGRAM DAN KEGIATAN
DEPARTEMEN PERTANIAN
TAHUN 2007**



**DEPARTEMEN PERTANIAN
2006**

KATA PENGANTAR

Program dan kegiatan Departemen Pertanian tahun 2007 disusun dengan mengacu kepada: (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2004-2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025; (2) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2007, (3) Rencana Strategis Departemen Pertanian Tahun 2005-2009; (4) masukan dari berbagai kalangan, antara lain anggota DPR-RI, para pakar, dan berbagai pihak terkait lainnya; dan (5)antisipasi masalah dan tantangan yang berkembang saat ini dan akan datang.

Tahun 2007 merupakan tahun ketiga pelaksanaan program kerja Kabinet Indonesia Bersatu yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Oleh karena itu, pelaksanaan program dan kegiatan Departemen pertanian tahun 2007 akan difokuskan pada pemantapan kebijakan dan program yang telah direncanakan sejak tahun 2004 serta pada kegiatan utama yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun selanjutnya dalam rangka pencapaian sasaran akhir RPJMN sektor pertanian di tahun 2009.

Buku ini merupakan bagian dari dokumen Rencana Kerja Kementrian/Lembaga (RK-KL) Departemen Pertanian tahun 2007, berisi program utama dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan utama Departemen Pertanian tahun 2007 yang diyakini mampu mendorong percepatan pembangunan pertanian di Indonesia. Urutan bab dalam buku ini terdiri dari: (1) Latar Belakang (2) Capaian Pembangunan Pertanian; (3) Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Pertanian; (4) Rencana Pembangunan Pertanian Jangka Panjang 2005-2025; (5) Rencana Pembangunan Pertanian Jangka Menengah 2004-2009; (6) Sasaran Pembangunan Pertanian Tahun 2007; (7) Program dan Kegiatan Departemen Pertanian Tahun 2007; dan (8) Anggaran Pembangunan Departemen Pertanian Tahun 2007.

Akhirnya, semoga *Buku Program dan Kegiatan Departemen Pertanian Tahun 2007* ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kebijakan dan program, anggaran dan perencanaan evaluasi pembangunan pertanian di tahun 2007 di Indonesia.

Jakarta, Desember 2006
Sekretaris Jenderal
Departemen Pertanian

Dr. Ir. Hasanuddin Ibrahim, SpI
NIP. 080 056 939

Daftar Isi

KATA PENGANTAR

Bab 1 LATAR BELAKANG

1.1	Kondisi Umum	1
1.2	Pentingnya Sektor Pertanian	2

Bab 2 CAPAIAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

2.1	Indikator Makro	6
2.2	Indikator Produksi Pertanian	13
2.3	Produk Legislasi	18

Bab 3 PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

3.1	Permasalahan	20
3.2	Tantangan	23

Bab 4 RENCANA PEMBANGUNAN PERTANIAN JANGKA PANJANG 2005-2025

4.1	Visi Pembangunan Pertanian Tahun 2025	24
4.2	Arah Kebijakan	25

Bab 5 RENCANA PEMBANGUNAN PERTANIAN JANGKA MENENGAH 2004-2009

5.1	Visi dan Misi	35
5.2	Strategi	36
5.3	Kebijakan	42

Bab 6 SASARAN PEMBANGUNAN PERTANIAN TAHUN 2007

6.1	Nasional	45
6.2	Departemen Pertanian	45

Bab 7 PROGRAM DAN KEGIATAN DEPARTEMEN PERTANIAN TAHUN 2007

7.1	Program dan Kegiatan	50
7.2	Implementasi Operasional	60

Bab 8 ANGGARAN PEMBANGUNAN DEPARTEMEN PERTANIAN TAHUN 2007

Bab 9 PENUTUP

REFERENSI

Bab 1
LATAR BELAKANG



Bab 1.

LATAR BELAKANG

1.1. Kondisi Umum

Sektor pertanian mempunyai peran langsung dan tidak langsung dalam perekonomian nasional. Peran langsung sektor pertanian adalah melalui pembentukan PDB, penyediaan sumber devisa melalui ekspor, penyediaan pangan dan bahan baku industri, pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja dan perbaikan pendapatan masyarakat. Di sisi lain, peran tidak langsung sektor pertanian adalah melalui efek pengganda (*multiplier effect*) berupa keterkaitan input-output antar industri, konsumsi dan investasi.

Sekitar 40-50 persen tenaga kerja Indonesia memiliki mata pencaharian di sektor pertanian (BPS, 2006), dengan demikian pembangunan pertanian diharapkan dapat memperbaiki pendapatan penduduk secara lebih merata dan berkelanjutan, serta pada akhirnya dapat memakmurkan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Pengamatan empiris di banyak negara menunjukkan bahwa tahapan pembangunan berkelanjutan yang digerakkan oleh sektor industri (barang dan jasa) berbasis ilmu dan teknologi modern perlu didahului dengan pencapaian tahapan pembangunan

pertanian yang handal dan kuat. Pada umumnya, negara yang pendapatan per kapitanya kurang dari US\$ 2500,00 (dua ribu limaratus dollar AS), pertanian masih menjadi sektor yang sangat penting bagi perekonomian nasionalnya.

Bagi negara-negara tersebut, pertanian menjadi tulang punggung bagi tegaknya ekonomi negara. Pertanian tidak saja menyediakan kebutuhan pangan bagi penduduknya, tetapi juga merupakan sumber pendapatan devisa (ekspor), dan sebagai pendorong dan penarik bagi tumbuhnya industri nasional.

1.2. Pentingnya Sektor Pertanian

Selama beberapa dekade terakhir ini, strategi pembangunan nasional lebih terfokus pada sektor industri berspektrum luas tanpa memperhatikan keterkaitannya dengan sektor pertanian. Sektor pertanian lebih diarahkan sebagai sektor penunjang dan pendukung pembangunan, dan bukan sektor andalan atau basis pembangunan ekonomi nasional. Keunggulan komparatif pertanian belum diarahkan menjadi keunggulan kompetitif nasional. Akibatnya, walaupun cenderung terus membaik, tetapi kinerja sektor pertanian belum optimal. Meskipun persentase terbesar tenaga kerja Indonesia memiliki mata pencaharian di sektor pertanian, sektor

industri lebih diharapkan menjadi sektor andalan dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Hal ini membuat struktur ekonomi menjadi rapuh. Krisis ekonomi tahun 1997-1998 memperlihatkan bahwa sektor industri tidak mampu bertahan pada saat krisis. Ketika ekonomi nasional mengalami kontraksi (*negatif*) sebesar 13,68 persen pada saat krisis 1997-1998, sektor pertanian tetap tumbuh positif sebesar 0,22 persen (BPS, 1999).

Krisis ekonomi tahun 1997 menunjukkan bahwa sektor pertanian tidak hanya terbukti tangguh menghadapi gejolak ekonomi, tetapi juga dapat berfungsi sebagai basis landasan perekonomian nasional, antara lain melalui perannya dalam penyerapan tenaga kerja dan penerimaan devisa. Selama terjadinya krisis ekonomi, penyerapan tenaga kerja secara nasional mengalami penurunan sebanyak 6,4 juta orang atau sekitar 2,13 persen, tetapi sektor pertanian mampu menciptakan lapangan kerja baru sebanyak 432.350 orang (BPS, 1999). Dalam penerimaan devisa, peningkatan ekspor pertanian selama masa krisis ekonomi (1997-1998) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata peningkatan ekspor pertanian sebelum krisis (1982-1997). Selama periode 1982-1997, ekspor pertanian rata-rata hanya sebesar 4,5 persen per tahun, sementara ekspor pertanian tahun 1998 naik sebesar 26,5 persen dibandingkan ekspor pertanian tahun 1997 (BPS, 1999).

Peningkatan ekspor pertanian tersebut terutama berasal dari produk agroindustri yang berbasis sumberdaya lokal, seperti minyak atsiri, asam lemak, dan barang anyaman. Petani di beberapa wilayah Indonesia, di saat krisis ekonomi tahun 1997 bahkan dapat menikmati harga yang tinggi dari berbagai komoditas perkebunan seperti coklat, kopi dan kelapa sawit.

Belajar dari pengalaman masa lalu tersebut, strategi pembangunan di masa kini dan mendatang haruslah menjadikan sektor pertanian sebagai sektor andalan perekonomian nasional. Apabila pembangunan ekonomi daerah dan nasional didasarkan atas keunggulan komparatif sektor pertanian, maka perekonomian yang terbangun akan memiliki kemampuan bersaing dan berdayaguna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, *Kabinet Indonesia Bersatu* mencanangkan *Revitalisasi Pertanian dan Perdesaan* dalam prioritas pembangunan ekonomi nasional 2005-2009 sebagai kebijakan nasional untuk meletakkan kembali sektor pertanian sebagai sektor andalan.

Revitalisasi Pertanian dan Perdesaan, secara garis besar ditujukan untuk: (a) meningkatkan peran sektor pertanian dalam perekonomian nasional, (b) menciptakan lapangan kerja berkualitas di perdesaan, yang ditandai dengan berkurangnya angka

pengangguran terbuka dan setengah terbuka, dan (c) meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan masyarakat perdesaan, yang dicerminkan dari peningkatan pendapatan dan produktivitas pekerja di sektor pertanian.

Bab 2
CAPAIAN PEMBANGUNAN PERTANIAN



Bab 2

CAPAIAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

2.1. Indikator Makro

(1). PDB Pertanian

Pada tahun 2005, sektor pertanian (tidak termasuk kehutanan dan perikanan) tumbuh 2,55 persen (harga konstan tahun 2000), sedikit menurun dibandingkan 2,83 persen di tahun 2004. Penurunan PDB ini terutama disebabkan pertumbuhan subsektor tanaman bahan makanan dan subsektor peternakan mengalami sedikit penurunan. Pertumbuhan subsektor tanaman bahan makanan menurun dari 2,89 persen di tahun 2004 menjadi 2,57 persen di tahun 2005, sementara pertumbuhan subsektor peternakan berkurang dari 3,35 persen di tahun 2004 menjadi 2,87 persen di tahun 2005. Walaupun demikian, subsektor perkebunan malah memperlihatkan kenaikan, meskipun sedikit, yaitu dari 2,21 persen di tahun 2004 menjadi 2,23 persen di tahun 2005. Kontribusi sektor pertanian (tidak termasuk kehutanan dan perikanan) terhadap PDB nasional pada tahun 2005 mencapai 11,36 persen, dengan kontribusi terbesar dari subsektor tanaman

bahan makanan sebesar 7,19 persen, diikuti oleh subsektor perkebunan (2,31%) dan subsektor peternakan (1,86%) (BPS, 2006).

Pada tahun selanjutnya, sektor pertanian memperlihatkan pertumbuhan yang menggembirakan, dimana semua subsektor tumbuh meningkat. PDB sektor pertanian meningkat dari 2,55 persen di tahun 2005 menjadi 3,41 persen di tahun 2006 (sampai triwulan III). Pertumbuhan paling tinggi disumbangkan oleh subsektor perkebunan, yang meningkat dari 2,23 persen di tahun 2005 menjadi 5,12 persen di tahun 2006 (triwulan III). Sementara itu, subsektor peternakan tumbuh dari 2,87 persen di tahun 2005 menjadi 3,99 persen di tahun 2006 (triwulan III), dan subsektor tanaman bahan makanan tumbuh dari 2,57 persen di tahun 2005 menjadi 2,89 persen di tahun 2006 (triwulan III) (BPS, 2006).

(2). Kesejahteraan Petani dan Penduduk Perdesaan

Krisis multi dimensi tahun 1997-1998 telah menyebabkan jumlah penduduk miskin meningkat dari 34,5 juta jiwa (17,7%) pada tahun 1996 menjadi 49,5 juta (24,2%) pada tahun 1998, dan menurun kembali menjadi 38,7 juta jiwa (19,1%) pada tahun 2000, serta terus menurun hingga pada tahun 2004 menjadi 36,1 juta jiwa (16,7%). Pembangunan pertanian telah menampakkan hasil dengan

berkontribusi terhadap berkurangnya penduduk miskin, terutama penduduk miskin di perdesaan. Sebagian besar penduduk miskin di perdesaan tersebut menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Penduduk miskin di sektor pertanian menempati proporsi 55 persen dari total penduduk miskin, dan sekitar 75 persen diantaranya pada subsektor tanaman pangan, 7,4 persen pada subsektor perikanan laut, dan 4,6 persen pada subsektor peternakan.

(3) Nilai Tukar Petani

Selain jumlah penduduk miskin di perdesaan, variabel indikator kesejahteraan petani adalah indeks Nilai Tukar Petani (NTP), yakni indeks rasio harga yang diterima dengan harga yang dibayar oleh rumah tangga tani. Dalam periode 2000-2004, pembangunan pertanian telah berhasil meningkatkan kesejahteraan petani secara signifikan. Setelah anjlok hingga tahun 2000, NTP secara nasional terus meningkat dari 96,93 (1993 = 100) pada tahun 2000 menjadi 114,26 pada tahun 2003, dan menjadi 119,19 pada tahun 2004. Terutama karena diakibatkan kenaikan harga BBM, NTP mengalami sedikit penurunan yaitu menjadi 100,95 di tahun 2005. Tercatat sampai bulan September 2006, NTP telah menunjukkan kenaikan kembali menjadi 103,02 (BPS, 2006).

Pendapatan petani adalah produktivitas tenaga kerja yang diukur sebagai nilai PDB per tenaga kerja di sektor pertanian. Berdasarkan harga konstan 2000, setelah menurun pada tahun 1998-1999, pendapatan tenaga kerja pertanian meningkat secara nyata selama periode tahun 2000-2005. Rata-rata pendapatan tenaga kerja petani meningkat sedikit sebesar 7,8% dari Rp 5,09 juta di tahun 2003 menjadi Rp 5,49 juta pada tahun 2004, tetapi kemudian meningkat secara signifikan menjadi Rp 6,09 juta di tahun 2005.

(4). Investasi dan Kesempatan Kerja

Minat investasi di sektor pertanian primer sepanjang tahun 2004-2006 menunjukkan peningkatan cukup tajam. Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) meningkat dari Rp 1,92 triliun di tahun 2004 menjadi Rp 4,34 triliun di tahun 2005, dan menjadi 6,71 triliun di tahun 2006 (sampai 31 Agustus). Sementara itu, persetujuan Penanaman Modal Asing (PMA) meningkat dari 208.31 juta dollar AS di tahun 2004 menjadi 461.8 juta dollar AS di tahun 2005. Perhitungan angka sementara sampai 31 Agustus 2006, nilai persetujuan PMA ini memperlihatkan sedikit peningkatan menjadi 463 juta dollar AS.

Seiring dengan perbaikan ekonomi nasional akibat krisis ekonomi di tahun 1997, jumlah penyerapan tenaga kerja sektor

pertanian mengalami peningkatan yang cukup mengesankan meski berfluktuasi. Sektor pertanian menyerap tenaga kerja sekitar 37,35 juta orang per tahun sebelum masa krisis (1992-1997), kemudian meningkat menjadi 38,38 juta orang di tahun 1999 dan 40,68 juta di tahun 2000. Jumlah tenaga kerja pertanian mengalami sedikit penurunan menjadi 39,74 juta orang di tahun 2001, tetapi meningkat kembali menjadi 40,63 juta orang di tahun 2002 dan 43,04 juta orang di tahun 2003. Penyerapan tenaga kerja pertanian menunjukkan penurunan kembali menjadi 40,61 juta orang di tahun 2004 dan meningkat menjadi 41,81 juta orang di tahun 2005.

Secara keseluruhan, selama periode 2000-2005 sektor pertanian memiliki trend pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang meningkat. Dari total angkatan kerja, tenaga kerja pertanian tumbuh 1,24 persen selama kurun waktu 2000-2004, kemudian meningkat menjadi 2,97 persen selama tahun 2004-2005. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian ini terutama terjadi pada tenaga kerja yang bekerja penuh. Hal ini merupakan bukti bahwa pertanian masih menjadi sektor andalan untuk penyerapan tenaga kerja nasional.

(5). Neraca Perdagangan

Selama tahun 1993-2003, neraca perdagangan (*balance of trade*) komoditas pertanian mengalami peningkatan secara nyata. Hal ini disebabkan nilai ekspor terus meningkat sementara nilai impor komoditas pertanian relatif tidak banyak mengalami perubahan. Nilai ekspor komoditas pertanian adalah sebesar US\$ 5,17 milyar selama periode sebelum krisis (1993-1997) meningkat menjadi US\$ 5,60 milyar selama periode krisis (1998-1999) dan meningkat nyata menjadi US\$ 13,05 milyar selama periode pemulihan krisis (2000-2003). Akibatnya, selama periode sebelum krisis ekonomi (1993-1997), surplus neraca perdagangan sebesar US\$ 2,24 milyar. Pada periode krisis (1998-1999), surplus neraca perdagangan meningkat menjadi US\$ 2,51 milyar dan di tahun 2003, surplus neraca perdagangan komoditas pertanian meningkat lagi menjadi US\$ 4,90 milyar. Surplus neraca perdagangan terus meningkat sepanjang tahun 2004-2005, hingga mencapai US\$ 4,86 milyar di tahun 2004 dan US\$ 6,30 milyar di tahun 2005. Pencapaian surplus neraca perdagangan ini terutama ditunjukkan oleh subsektor perkebunan, sementara subsektor lain (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan) memperlihatkan neraca perdagangan yang defisit.

(6) Ketersediaan Pangan

Selama kurun waktu 2005-2006, ketersediaan beras memperlihatkan peningkatan. Produksi beras meningkat dari 30,67 juta ton di tahun 2005 menjadi 32,03 juta ton di tahun 2006, sehingga ketersediaan beras juga naik dari 34,43 juta ton di tahun 2005 menjadi 35,86 juta ton di tahun 2006. Dengan konsumsi beras sebanyak 30,60 juta ton di tahun 2005 dan 30,90 juta ton di tahun 2006 (angka sementara), maka terdapat penambahan stok beras sebanyak sekitar 110 ribu ton dari 3,83 juta ton di tahun 2005 menjadi 3,94 juta ton di tahun 2006 (angka sementara).

Selama periode 2005 hingga sekarang, rasio impor beberapa bahan pangan penting terhadap total penyediaan pangan menunjukkan bahwa ketergantungan impor dalam bentuk energi per jenis bahan pangan terhadap total penyediaan energi, secara umum relatif kecil. Ketergantungan terhadap impor (energi) untuk daging ayam, telur, minyak goreng, ubi kayu dan ubi jalar masing-masing sebesar 0 persen, sedangkan beras sebesar 0,77 persen. Angka ketergantungan yang relatif tinggi adalah susu, kedelai, gula, jagung, kacang tanah, daging sapi dan daging kerbau. Kondisi ini tidak terlepas dari efektifitas instrumen kebijakan Pemerintah yang

difokuskan pada upaya untuk mewujudkan kemandirian pangan, khususnya pangan beras, bagi seluruh masyarakat Indonesia.

2.2. Indikator Produksi Pertanian

(1). Tanaman pangan

Selama periode tahun 2004-2006 telah terjadi berbagai peningkatan produksi tanaman pangan. Produksi padi meningkat sebesar 0,12% dari 54,09 juta ton GKG di tahun 2004 menjadi 54,15 juta ton GKG di tahun 2005, kemudian meningkat lagi sebanyak 0,95 persen menjadi 54,66 juta ton GKG di tahun 2006 (ARAM III). Peningkatan produksi padi tersebut menunjukkan bahwa upaya kebijakan Pemerintah meningkatkan produktivitas padi cukup berhasil. Produktivitas meningkat sebesar 0,8 persen dari 45,36 ku/ha di tahun 2004 menjadi 45,74 ku/ha di tahun 2005, kemudian meningkat lagi menjadi 46,11 ku/ha di tahun 2006 (ARAM III) (BPS, 2006). Dalam upaya meningkatkan produksi padi ini, pemerintah menerapkan kebijakan harga dasar, subsidi pupuk dan inovasi teknologi seperti penemuan bibit unggul baru, inovasi teknologi budidaya dan perbaikan infrastruktur maupun kelembagaan.

Untuk komoditas jagung, selama tahun 2004-2005 terjadi peningkatan produksi sebesar 11,57% dari 11,23 juta ton di tahun

2004 menjadi 12,52 juta ton di tahun 2005. Selama tahun 2005-2006, karena masalah air dan kurangnya insentif harga, maka produksi jagung memperlihatkan sedikit penurunan sebanyak 0,31 persen dari 12,52 juta ton di tahun 2005 menjadi 12,13 juta ton di tahun 2006 (ARAM III) (BPS, 2006).

Tercatat untuk periode 2004-2005, komoditas pangan lain, seperti kedele dan kacang hijau menunjukkan peningkatan produksi. Produksi kedele meningkat sebesar 11,7% dari 723 ribu ton di tahun 2004 menjadi 808 ribu ton di tahun 2005; dan kacang hijau meningkat sebesar 2,5 persen dari 310 ribu ton di tahun 2004 menjadi 318 ribu ton di tahun 2005 (BPS, 2006).

(2). Hortikultura

Periode tahun 2004 sampai 2006 mencatat bahwa produksi buah-buahan dan sayuran memiliki trend yang meningkat. Produksi buah-buahan naik sebesar 3,05 persen dari 14,35 ribu ton di tahun 2004 menjadi 14,79 ribu ton di tahun 2005, kemudian naik lagi sebanyak 8,48 persen menjadi 16,04 ribu ton di tahun 2006 (angka sementara). Untuk sayuran, produksi naik sebesar 0,47 persen dari 9,06 ribu ton di tahun 2004 menjadi 9,10 ribu ton di tahun 2005, kemudian meningkat lagi sebanyak 14,23 persen menjadi 10,40 ribu ton di tahun 2006 (angka sementara) (BPS, 2006).

Sementara itu, tanaman hias secara keseluruhan meningkat sebanyak 5,8% dari 158,5 juta tangkai di tahun 2004 menjadi 167,6 juta tangkai di tahun 2005, dan tanaman biofarmaka juga meningkat sebesar 6,7% dari 231,7 ribu ton di tahun 2004 menjadi 247,1 ribu ton di tahun 2005. Peningkatan angka-angka produksi tersebut diatas menunjukkan bahwa komoditas hortikultura (buah-buahan, sayuran, tanaman hias, dan tanaman biofarmaka) dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan tinggi bagi sektor pertanian.

(3). Perkebunan

Secara umum, sektor perkebunan memperlihatkan peningkatan produksi dari tahun 2004 sampai 2006. Peningkatan yang besar ditunjukkan oleh komoditas tebu, kelapa sawit, dan karet. Produksi tebu naik sebesar 9,3 persen dari 2,0 juta ton pada tahun 2004 menjadi 2,3 juta ton pada tahun 2005 (angka sementara), dan 2,4 juta ton pada tahun 2006 (angka estimasi). Produksi kelapa sawit meningkat 6,3 persen dari 11,80 juta ton di tahun 2004 menjadi 13,40 juta ton di tahun 2005 (angka sementara), kemudian naik lagi sebanyak 13,68 persen menjadi 15,23 juta ton di tahun 2006 (angka estimasi). Tanaman karet produksinya meningkat 3,0 persen dari 1,85 juta ton di tahun 2004 menjadi 2,27

juta ton di tahun 2005 (angka sementara), dan naik lagi sebesar 4,24 persen menjadi 2,37 juta ton di tahun 2006 (angka estimasi).

Selama 2005-2006, produksi tanaman perkebunan lainnya seperti kelapa, jambu mete, lada, cengkeh, dan kapas menunjukkan sedikit peningkatan, sementara kopi, kakao, dan teh mencatatkan penurunan produksi.

(4). Peternakan

Sejak awal tahun 1980an, subsektor peternakan mencanangkan gerakan "**Revolusi Peternakan**" (*Livestock Revolution*). Sejak 1993, populasi ayam pedaging dan telur meningkat dengan pesat dengan laju rata-rata masing-masing 12,74% dan 6,76% per tahun. Kedua komoditas ini adalah sumber utama pertumbuhan yang tinggi di subsektor peternakan.

Selama kurun waktu tahun 2005-2006, produksi daging semua jenis ternak mengalami peningkatan. Persentase peningkatan tertinggi diperlihatkan oleh ayam ras pedaging yang naik sebesar 22,67 persen dari 779,1 ribu ton pada tahun 2005 menjadi 955,8 ribu ton pada tahun 2006 (angka sementara), diikuti oleh ayam ras yang meningkat 20,18 persen dari 45,2 ribu ton di tahun 2005 menjadi 54,3 ribu ton di tahun 2006 (angka sementara).

Untuk produksi daging ternak lain, sapi potong naik 8,63 persen dari 358,7 ribu ton di tahun 2005 menjadi 389,3 ribu ton di tahun 2006 (angka sementara); domba naik 9,65 persen dari 47,3 ribu ton di tahun 2005 menjadi 51,9 ribu ton di tahun 2006 (angka sementara); ayam buras meningkat 7,08 persen dari 301,4 ribu ton di tahun 2005 menjadi 322,8 ribu ton di tahun 2006 (angka sementara); kambing naik 5,28 persen dari 50,6 ribu ton di tahun 2005 menjadi 53,3 ribu ton di tahun 2006 (angka sementara); kerbau naik 3,81 persen dari 38,1 ribu ton di tahun 2005 menjadi 39,5 ribu ton di tahun 2006 (angka sementara); babi meningkat 3,32 persen dari 173,7 ribu ton di tahun 2005 menjadi 179,4 ribu ton di tahun 2006 (angka sementara). Sementara itu, pada periode yang sama, 2005-2006, produksi telur juga mencatatkan peningkatan. Ayam ras petelur meningkat sebesar 10,26 persen dari 681,1 ribu ton di tahun 2005 menjadi 751 ribu ton di tahun 2006 (angka sementara).

Epidemi flu burung (*Avian Influenza*, AI) yang mulai berjangkit pada akhir tahun 2003 dan berkembang hingga saat ini menjadi ancaman serius bagi pengembangan industri peternakan, terutama unggas, di Indonesia. Untuk itu sejak tahun 2005 sampai sekarang Departemen Pertanian bersama instansi terkait telah menyusun strategi nasional pengendalian flu burung dan

kesiapsiagaan menghadapi wabah AI tersebut. Langkah-langkah konkrit yang telah dilaksanakan adalah: (1) pembentukan unit pengendalian AI; (2) penyediaan vaksinasi, sebanyak 22,3 juta dosis di tahun 2005 dan 120 juta dosis di tahun 2006; (3) melakukan depopulasi, sebanyak 0,3 juta ekor di tahun 2005 dan 0.154 juta ekor di tahun 2006; (4) pemberian kompensasi kepada peternak, sebesar Rp. 4,20 milyar di tahun 2005 dan Rp. 1,57 milyar di tahun 2006; (5) upaya peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat; dan (6) aksi deteksi dini.

2.3. Produk Legislasi

Selama kurun waktu tahun 2005-2006 telah dihasilkan beberapa produk hukum berupa undang-undang, antara lain: (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Undang-Undang Penyuluhan ini merupakan tonggak awal dalam membangkitkan semangat penyuluh yang beberapa tahun sebelumnya terabaikan. (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2006 tentang Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian. (3) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta (4) Rancangan Undang-Undang (RUU)

tentang Lahan Pertanian Abadi. Kedua RUU ini telah mulai disusun pada tahun 2006 dan akan dibahas di tahun 2007.

Bab 3
**PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
PEMBANGUNAN PERTANIAN
TAHUN 2007**



Bab 3

PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

3.1. Permasalahan

Sebagaimana telah disampaikan pada beberapa kesempatan sebelumnya, bahwa pembangunan pertanian hingga saat ini masih menghadapi beberapa masalah antara lain:

(1). Sumberdaya pertanian terbatas dan menurun.

Kapasitas sumberdaya pertanian terutama lahan dan air menjadi terbatas dan menurun karena konversi lahan dan kompetisi pemanfaatan air antara pertanian dengan non-pertanian (perumahan dan industri) semakin meningkat. Dari Sensus Pertanian Tahun 2003 yang dilaksanakan oleh BPS, diperkirakan konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian selama periode Agustus 1999 – Agustus 2002 adalah sekitar 187.720 ha/tahun.

(2). Sistem alih teknologi lemah dan kurang tepat sasaran

Pada era desentralisasi, kegiatan penyuluhan kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Hal ini mengakibatkan keterkaitan antara peneliti, penyuluh, dan petani menjadi kurang intensif, sehingga diseminasi teknologi menjadi lambat dan kurang tepat sesuai kebutuhan.

(3). Akses permodalan terbatas

Keterbatasan modal ini terutama karena petani Indonesia adalah petani kecil (gurem) yang kurang mampu memenuhi persyaratan dan prosedur pengajuan kredit kepada lembaga keuangan formal. Akibatnya usaha pertanian menghadapi keterbatasan modal.

(4). Rantai tataniaga panjang dan belum adil

Kondisi infrastruktur perdesaan (transportasi, pasar, gudang) yang belum memadai menyebabkan rantai tataniaga menjadi panjang. Akibatnya petani menjadi kurang dekat dengan pasar dan posisi tawar petani di pasar menjadi lemah.

(5). Kualitas sumberdaya petani/peternak rendah

Tingkat pendidikan petani/peternak pada umumnya rendah (81,7 % tidak tamat dan tamat SD). Hal ini mengakibatkan petani kurang mampu mengakses informasi teknologi, pasar, dan pembiayaan.

(6). Kelembagaan (kelompok) petani lemah

Selama ini, pembentukan kelembagaan (kelompok) tani lebih banyak untuk kepentingan proyek, sehingga keberadaannya menjadi lemah terutama ketika proyek berakhir. Penguatan kelembagaan (kelompok) tani diperlukan agar usaha tani dapat berkelanjutan.

(7). Infrastruktur pembangunan pertanian terbatas

Keberadaan kelembagaan seperti karantina, laboratorium uji mutu, irigasi, listrik, transportasi, keuangan, pengolahan, dan pemasaran masih terbatas, akibatnya usaha pertanian kurang berkembang.

(8). Teknologi mekanisasi dan pasca panen belum berkembang

Produksi pertanian Indonesia sebagian besar masih dalam bentuk produk primer dan memiliki tingkat kehilangan hasil yang tinggi. Hal ini mencirikan bahwa teknologi mekanisasi

dan pasca panen belum berkembang atau walaupun ada belum dimanfaatkan secara optimal.

(9). Perangkat peraturan kepastian usaha pertanian kurang mendukung

Perangkat peraturan yang terkait dengan pelaku usaha dan konsumen sektor pertanian, kurang mendukung, akibatnya usaha pertanian kurang berkembang.

(10). Kebijakan makro ekonomi belum berpihak kepada petani

Pada saat ini, kebijakan ekonomi makro (fiskal dan moneter) dan perdagangan dinilai masih belum kondusif bagi pembangunan pertanian.

3.2. Tantangan

Beberapa tantangan pembangunan pertanian yang masih dihadapi hingga saat ini antara lain: i) optimasi pemanfaatan sumberdaya pertanian; ii) peningkatan ketahanan pangan dan penyediaan bahan baku industri; iii) penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan; iv) operasionalisasi pembangunan berkelanjutan; v) globalisasi perdagangan dan investasi; vi) terbangunnya industri hasil pertanian sampai tingkat desa; dan vii) penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*)

Bab 4

**RENCANA PEMBANGUNAN PERTANIAN
JANGKA PANJANG 2005 - 2025**



Bab 4

RENCANA PEMBANGUNAN PERTANIAN JANGKA PANJANG 2005 - 2025

4.1. Visi Pembangunan Pertanian Tahun 2025

Tujuan akhir pembangunan pertanian adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat pertanian melalui sistem pertanian industri. Oleh karena itu, pembangunan jangka panjang sektor pertanian berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat pertanian. Sedangkan sasaran jangka panjang pembangunan pertanian adalah: (1) terwujudnya sistem pertanian industri yang berdayasaing, (2) mantapnya ketahanan pangan secara mandiri, (3) terciptanya kesempatan kerja penuh bagi masyarakat pertanian, dan (4) terhapusnya kemiskinan di sektor pertanian dan tercapainya pendapatan petani US \$ 2.500 per kapita per tahun.

Mengacu pada sasaran pembangunan jangka panjang di atas, maka visi pembangunan pertanian periode tahun 2005-2025 dirumuskan sebagai berikut: ***“Terwujudnya sistem pertanian industrial berkelanjutan yang berdayasaing dan mampu menjamin ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.*”**

4.2. Arah Kebijakan

Garis-garis besar kebijakan yang akan ditempuh dalam mewujudkan visi di atas adalah sebagai berikut:

(1). Membangun Basis bagi Partisipasi Petani

Basis partisipasi petani perlu dibangun dengan kuat agar mereka mampu berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan sehingga mereka mampu memperoleh manfaat hasil-hasil pembangunan secara cukup, adil dan merata.

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat strategis untuk dijadikan sebagai instrumen dalam pengentasan penduduk miskin. Kemajuan sektor pertanian akan memberikan kontribusi besar dalam penurunan jumlah penduduk miskin di wilayah perdesaan melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Dengan demikian, basis bagi partisipasi petani untuk melakukan perencanaan dan pengawasan pembangunan pertanian harus dibangun, sehingga petani mampu mengaktualisasikan kegiatan usahataniya secara optimal untuk menunjang pertumbuhan pendapatannya. Hasil-hasil pembangunan harus terdistribusi makin merata antar sektor, antar subsektor dalam sektor pertanian dan antar lapisan masyarakat agar tidak ada lagi

lapisan masyarakat yang tertinggal dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dapat meningkat.

(2). Meningkatkan Potensi Basis Produksi dan Skala Usaha Pertanian

Lahan pertanian ditingkatkan melalui pembukaan areal baru khususnya di Luar Jawa dengan memacu investasi swasta baik usaha pertanian rakyat maupun perusahaan besar pertanian yang bermitra dengan usaha pertanian rakyat dengan dukungan fasilitasi komplementer dan insentif dari pemerintah.

Peningkatan potensi basis produksi dikembangkan dengan sasaran penyeimbangan pemanfaatan lahan antar daerah di Indonesia. Peningkatan skala usaha pertanian dikembangkan melalui implementasi pertanian kooperatif yang kokoh dan kuat baik kerjasama antar petani secara horizontal maupun kerjasama dengan pelaku bisnis sepanjang alur vertikal sistem komoditas yang bersangkutan.

(3). Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Sumberdaya Insani Pertanian yang Berkualitas

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia ini difokuskan pada peningkatan kemampuan penguasaan teknologi,

kewirausahaan dan manajemen usaha tani melalui pengembangan sistem pendidikan dan penyuluhan pertanian.

Arah kebijakan ini diimplementasikan dalam bentuk revitalisasi sistem pendidikan dan penyuluhan pertanian sehingga sistem tersebut mampu menciptakan insan pertanian yang berkualitas mampu menguasai dan menerapkan teknologi dan mampu mengelola usahatannya secara efisien.

(4). Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Pertanian

Kebutuhan infrastruktur pertanian, utamanya sarana irigasi, jalan pertanian dan perdesaan, kelistrikan dan telekomunikasi perdesaan serta pasar pertanian yang bersifat publik dibangun selengkap mungkin oleh pemerintah dengan memberikan kesempatan kepada swasta untuk turut berpartisipasi pada bidang-bidang tertentu yang mungkin diusahakan secara komersial. Dengan terwujudnya infrastruktur pertanian yang mapan diharapkan daya saing produk pertanian meningkat dan pendapatan petani meningkat pula.

(5). Mewujudkan Sistem Pembiayaan Pertanian Tepat Guna

Sistem pembiayaan pertanian yang sesuai dengan karakteristik petani dibangun dengan menumbuh-kembangkan lembaga keuangan khusus yang melayani pertanian, baik berupa bank pertanian maupun lembaga keuangan mikro.

Landasan utama dari sistem keuangan modern (*modern capital market*) yang berlaku di Indonesia adalah tambahan modal (*capital gain*) atau dalam bahasa sehari-hari adalah bunga dari setiap modal atau uang yang dipinjamkan. Oleh karena itu, maka setiap pemodal (*lenders*) akan menuntut adanya agunan (*collateral*) dari setiap pemimjam (*borrowers*).

Dengan demikian, dasar dari ekonomi modern adalah ***agunan bukan kepercayaan***, sehingga sistem ekonomi modern tidak mungkin berkembang dalam masyarakat miskin seperti petani di Indonesia, karena ketidakmampuan dalam menyediakan agunan. Kalau demikian halnya, maka perlu dikembangkan sistem keuangan yang berdasarkan pada ***kepercayaan, namun dikelola secara profesional***. Sistem ***ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi Islam yang dikembangkan berdasarkan kepercayaan yang diimplementasikan ke dalam sistem pembagian keuntungan dan resiko dari setiap usaha bersama secara profesional***. Dengan sistem

ekonomi syariah maka petani dapat melakukan akses kepada sistem tersebut sehingga mereka diharapkan mampu melakukan usaha tani tanpa kendala modal.

(6). Mewujudkan Sistem Inovasi Pertanian

Sistem inovasi pertanian dibangun oleh lembaga penelitian pemerintah sebagai penggerak utama dan lembaga penelitian swasta sebagai komplemennya. Sistem inovasi pertanian mengintegrasikan lembaga penelitian penghasil ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dasar, lembaga pemerintah atau swasta sebagai pengganda IPTEK, dan lembaga penyuluhan sebagai fasilitator penyampaian IPTEK kepada petani. Sistem inovasi pertanian yang efisien akan mempercepat proses adopsi inovasi oleh petani, sehingga muatan teknologi dalam produk pertanian makin meningkat dan daya saing menjadi kuat.

Penguasaan bioteknologi diperlukan dalam rangka membangun sistem produksi yang mampu merespon preferensi konsumen untuk meningkatkan daya saing produk yang bersangkutan. Pada akhir tahun 2025, bioteknologi harus menjadi bagian dalam sistem pertanian industri.

Kebijakan ini juga diarahkan untuk mengembangkan produk-produk pertanian untuk meningkatkan nilai tambah komoditas melalui pengembangan agroindustri perdesaan. Selain peningkatan nilai tambah, pengembangan agroindustri ini mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak di sektor pertanian primer sekaligus menjadi penampung tenaga kerja di sektor pertanian primer sehingga produktivitas pertanian primer secara nyata mengalami peningkatan.

(7). Penyediaan Sistem Insentif dan Perlindungan Bagi Petani

Penyediaan insentif dan perlindungan bagi petani dilakukan untuk merangsang peningkatan produksi, investasi dan efisiensi usaha pertanian melalui kebijakan makro meliputi kebijakan fiskal, moneter dan perdagangan. Kebijakan insentif mencakup pemberian jaminan harga, subsidi dan keringanan pajak. Perlindungan bagi petani mencakup proteksi terhadap praktek perdagangan yang tidak adil dan gagal panen akibat anomali iklim.

Kebijakan sistem insentif ini sangat diperlukan untuk meningkatkan aliran investasi ke sektor pertanian untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian. Pada akhir tahun 2025 diharapkan seluruh kapasitas produksi pertanian dapat dimanfaatkan secara penuh. Pengembangan kapasitas pertanian

tidak hanya menyangkut sumberdaya alam tetapi juga menyangkut teknologi dan manajemen.

(8). Mewujudkan Sistem Usahatani Bernilai Tinggi melalui Intensifikasi, Diversifikasi dan Pewilayahan Pengembangan Komoditas Unggulan

Pewilayahan pengembangan komoditas unggulan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya pertanian dan mendorong investasi baru berdasarkan keunggulan komparatif daerah. Sedangkan dalam kaitan dengan efisiensi pemanfaatan sumberdaya pertanian, maka untuk mengurangi tekanan penggunaan lahan di pulau Jawa, secara perlahan-lahan pulau Jawa diarahkan untuk pengembangan komoditas bernilai tinggi (*high value commodities development*) seperti hortikultura, sedangkan pengembangan komoditas pangan diarahkan ke pulau Kalimantan dan pulau Sulawesi. Pengembangan komoditas perkebunan diarahkan ke pulau Papua dan pulau Maluku. Pengembangan komoditas peternakan berbasis lahan diarahkan ke pulau Bali dan pulau Nusa Tenggara

(9). Mewujudkan Agroindustri Berbasis Pertanian Domestik di Perdesaan

Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah disepanjang alur vertikal sistem komoditas pertanian melalui

pengembangan produk agroindustri yang berbasis sumberdaya domestik dan perdesaan. Dengan terwujudnya agroindustri, maka kontribusi sektor pertanian terhadap nilai tambah dan kesempatan kerja terhadap perekonomian perdesaan makin meningkat. Agroindustri ini salah satu pilar sistem pertanian industri yang akan menjadi fondasi struktur ekonomi nasional pada akhir tahun 2025.

(10). Mewujudkan Sistem Rantai Pasok Terpadu Berbasis Kelembagaan Pertanian yang Kokoh

Pengembangan rantai pasok terpadu komoditas pertanian secara vertikal dilakukan melalui sistem kemitraan yang sehat dan adil. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan regulator yang kredibel dan adil untuk mewujudkan pertumbuhan sektor pertanian yang berkelanjutan. Pertumbuhan sektor pertanian sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi perekonomian perdesaan.

Sektor pertanian Indonesia, hingga saat ini masih sangat tergantung pada hasil primer, sehingga nilai tambah yang diperoleh masih rendah dan kurang kompetitif di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Ke depan, pemerintah harus dapat mendorong perkembangan produk pertanian olahan primer untuk meningkatkan nilai tambah serta meningkatkan dan memperluas pangsa pasar di dalam dan luar negeri. Negara berkembang

penghasil produk pertanian, saat ini banyak yang melakukan pengembangan produk pertanian untuk mensiasati perdagangan dunia yang tidak adil. Apabila hal ini dapat dilakukan maka sektor pertanian akan tumbuh lebih cepat. Pertumbuhan sektor pertanian yang makin cepat akan memacu pertumbuhan sektor-sektor lain melalui kaitan ke belakang dan ke depan dalam kegiatan produksi dan konsumsi. Dengan demikian, sektor pertanian akan lebih dikenal sebagai pengganda tenaga kerja, dan bukan sekedar pencipta kesempatan kerja. Pengembangan rantai pasok tersebut harus berbasis kelembagaan pertanian yang kokoh yang merupakan perekat relasi semua komponen di dalam sistem pertanian industrial. Kelembagaan pertanian dibangun berdasarkan prinsip kemitraan setara, sehat dan berkeadilan.

(11). Menerapkan Praktek Pertanian dan Manufaktur yang Baik

Praktek pertanian yang baik merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan sistem pertanian industri yang berdayasaing dan berwawasan lingkungan. Mutu produk pertanian harus dapat dijamin dan ditelusuri sesuai dengan standar persyaratan internasional. Untuk itu pemerintah akan menyusun protokol teknis dan insentif untuk merangsang penerapannya.

(12). Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berpihak Kepada Petani dan Pertanian

Pemerintahan yang baik dan bersih mutlak diperlukan untuk mewujudkan visi pertanian di atas. Pemerintah yang berpihak kepada petani dan pertanian diwujudkan melalui kebijakan fiskal, moneter dan perdagangan yang berpihak untuk mendukung pembangunan pertanian. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian, yaitu: bersih (*clean*), berkemampuan (*competent*), memberikan hasil positif (*credible*) dan secara publik dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*). Pembangunan pertanian akan berhasil jika diawali dengan cara penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dimana pemerintah merupakan agen pembangunan yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan.

Bab 5

**RENCANA PEMBANGUNAN PERTANIAN
JANGKA MENENGAH 2004 - 2009**



Bab 5

RENCANA PEMBANGUNAN PERTANIAN JANGKA MENENGAH 2004 - 2009

5.1. Visi dan Misi

Dengan memperhatikan visi dan arah pembangunan pertanian jangka panjang dan dinamika yang berkembang, **VISI Pembangunan Pertanian** jangka menengah periode 2004-2009 adalah *Terwujudnya pertanian tangguh untuk pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani.*

Untuk mencapai **visi** pembangunan pertanian jangka menengah tersebut, Departemen Pertanian mengemban **MISI** yang harus dilaksanakan yaitu:

- (1) Mewujudkan birokrasi pertanian yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi;
- (2) Mendorong pembangunan pertanian yang tangguh dan berkelanjutan;

- (3) Mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan penganekaragaman konsumsi;
- (4) Mendorong peningkatan peran sektor pertanian terhadap perekonomian nasional;
- (5) Meningkatkan akses pelaku usaha pertanian terhadap sumberdaya dan pelayanan; dan
- (6) Memperjuangkan kepentingan dan perlindungan terhadap petani dan pertanian dalam sistem perdagangan domestik dan global.

5.2. Strategi

Strategi umum Departemen Pertanian untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan pertanian adalah sebagai berikut:

(1). Melaksanakan Manajemen Pembangunan yang Bersih, Transparan dan Bebas KKN

Reformasi pembangunan menuntut rekonstruksi kelembagaan pemerintahan. Bersamaan, perlu pula dilakukan penataan berbagai sistem penyelenggaraan pemerintahan, antara lain melalui sistem penganggaran, sistem penggajian, sistem rekrutmen dan penjenjangan karir pegawai, sistem pengawasan dan pengendalian, serta pembinaan mental individu aparat. Sejalan dengan hal tersebut, Departemen Pertanian akan meningkatkan

moral dan profesionalitas aparat pertanian melalui pelaksanaan manajemen pembangunan yang bersih, transparan dan bebas KKN guna mendukung pelaksanaan manajemen pembangunan yang bersih, peduli, transparan dan kredibel. Kebijakan pembangunan pertanian akan dirancang dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, antara lain dalam bentuk debat publik, sosialisasi dan penyertaan masyarakat dalam pengawasan.

(2). Meningkatkan Koordinasi dalam Penyusunan Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Pertanian

Sebagai bagian dari pembangunan ekonomi, pembangunan pertanian harus dilaksanakan secara sinergis dengan pembangunan sektor lainnya dan mengacu kepada RPJMN. Di sisi lain, pelaku pembangunan pertanian tidak hanya Departemen Pertanian, tetapi juga Departemen Teknis terkait, Pemerintah Daerah, petani, swasta/dunia usaha, dan masyarakat, serta *stakeholders* lainnya. Dengan demikian, koordinasi adalah salah satu kunci keberhasilan. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, koordinasi adalah salah satu kunci keberhasilan karena kebijakan yang terkait dengan pembangunan pertanian tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Departemen Pertanian, melainkan sebagian besar berada di luar Departemen Pertanian.

Di tingkat Pusat, koordinasi dapat memanfaatkan forum-forum koordinasi lintas sektoral dan sidang kabinet, termasuk pertemuan yang dikoordinasikan oleh Bappenas, Kantor Menko Perekonomian dan Kantor Menko Kesejahteraan Rakyat. Forum-forum perencanaan dan advokasi kebijakan dan program pembangunan pertanian sesuai dengan peta kewenangan yang diatur oleh UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan untuk membangun koordinasi lintas Pusat-Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota). Di lingkup Departemen Pertanian, upaya koordinasi dilakukan dengan penjabaran tugas pokok dan fungsi unit kerja secara lebih jelas dan tegas antara tugas pembinaan (*steering*), pengawasan dan pelaksanaan (*rowing*).

(3). Memperluas dan Memanfaatkan Basis Produksi Secara Berkelanjutan

Permasalahan mendasar berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya pertanian secara berkelanjutan adalah konversi lahan yang menyebabkan penurunan luas baku lahan sawah pada khususnya, penurunan kualitas daerah aliran sungai hulu (DAS) sebagai akibat meningkatnya intensitas usahatani di daerah DAS, dan penambahan penduduk yang memerlukan pemenuhan

kebutuhan pangan sehingga meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian pangan. Salah satu dampak dari ekstensifikasi antara lain adalah penggundulan hutan dan eksploitasi sumberdaya lahan secara berlebihan. Di sisi lain, kekayaan dan keberagaman sumberdaya lahan dan hayati Indonesia, perlu dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal untuk menciptakan saling ketergantungan yang menguntungkan antar wilayah, dan memacu kegiatan perdagangan domestik dan global, mengembangkan investasi untuk menciptakan sumber pertumbuhan dan pendapatan baru dengan menempatkan petani sebagai pelaku utamanya. Untuk itu perlu: (1) perluasan dan pemanfaatan basis produksi secara berkelanjutan melalui konsolidasi, (2) optimalisasi pemanfaatan lahan, (3) pembukaan lahan baru terutama di luar Jawa, dan (4) pelestarian dan konservasi sumberdaya lahan dan hayati.

(4). Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Memberdayakan SDM Pertanian

Dengan pemilikan lahan rata-rata kurang dari 0,5 hektar, infrastruktur pertanian yang kurang memadai, organisasi petani dan kualitas sumberdaya manusia yang lemah, tanpa adanya kelembagaan petani yang kuat, akan mengakibatkan usahatani menjadi kurang menarik secara ekonomis. Upaya peningkatan

kesejahteraan petani kecil hanya dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM pertanian dan kemandirian petani, serta pengembangan kelembagaan pertanian untuk meningkatkan akses petani kepada aset produktif di wilayah perdesaan.

(5). Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pertanian

Sarana dan prasarana pertanian seperti sarana pengairan dan drainase, jalan, listrik, jalan usahatani, pelabuhan (khususnya pelabuhan-pelabuhan ekspor baru di wilayah timur Indonesia), transportasi dan telekomunikasi merupakan prasarana yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan pertanian. Penerapan inovasi teknologi sering terhambat karena tidak tersedianya sarana dan prasarana seperti penyediaan input produksi, jaringan informasi atau infrastruktur pemasaran hasil. Untuk itu pengembangan sarana dan prasarana dilakukan melalui: (1) fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana termasuk sarana pemasaran yang dibutuhkan oleh banyak pelaku pembangunan pertanian, (2) merangsang investor untuk melakukan investasi usaha di bidang pertanian, dan (3) melakukan advokasi kepada instansi/lembaga lain untuk berpartisipasi dalam membangun sarana dan prasarana pertanian.

(6). Meningkatkan Inovasi dan Diseminasi Teknologi Tepat Guna

Sejalan dengan pergeseran sistem dan manajemen produksi di masa yang akan datang dan menyikapi perkembangan permintaan pasar yang menyangkut mutu, harga, dan pelayanan, maka perubahan strategi dalam menghasilkan inovasi teknologi sangat diperlukan dengan memperhatikan keragaman pengguna, dan ekosistem pengembangannya. Dari sisi diseminasi, perlu perubahan strategi dalam mengidentifikasi dan melakukan karakterisasi pengguna dan pelaku penyebaran inovasi pertanian. Rendahnya produktivitas dan kualitas produk pertanian Indonesia merupakan akibat langsung dari rendahnya tingkat inovasi teknologi yang diterapkan petani. Untuk itu perlu penajaman program penelitian untuk menghasilkan inovasi teknologi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu perlu reorientasi sistem penelitian dan diseminasi teknologi.

(7). Mempromosikan dan Memproteksi Komoditas Pertanian

Komitmen Indonesia untuk menghilangkan hambatan dalam perdagangan yang dapat menimbulkan distorsi pasar ternyata tidak dilaksanakan oleh semua negara, sehingga petani Indonesia dihadapkan pada persaingan yang tidak adil dengan petani dari

negara lain yang dengan mudah mendapat perlindungan tarif dan non-tarif serta subsidi langsung dan tidak langsung. Oleh karena itu, ke depan pemerintah masih harus menerapkan pengendalian harga sekaligus mempromosikan produk-produk pertanian strategis. Proteksi dapat dilakukan antara lain melalui kebijakan penetapan tarif dan pengaturan impor, penetapan harga dasar, memberikan subsidi secara tepat untuk sarana produksi, dan subsidi bunga kredit untuk modal usahatani. Promosi dapat dilakukan melalui antara lain peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha, perbaikan kualitas dan standardisasi produk melalui penerapan teknologi produksi, pengelolaan pasca panen dan pengolahan hasil, serta menyediakan infrastruktur pertanian yang memadai.

5.3. Kebijakan

Kebijakan pembangunan pertanian tidak seluruhnya menjadi kewenangan Departemen Pertanian. Sebagian besar kebijakan tersebut berada di luar Departemen Pertanian. Beberapa kebijakan strategis di luar kewenangan Departemen Pertanian yang memerlukan penanganan segera, yaitu:

- (1) Kebijakan ekonomi makro yang kondusif yaitu inflasi yang rendah, nilai tukar yang stabil dan suku bunga riil yang bersaing dengan negara-negara lain.

- (2) Pembangunan infrastruktur pertanian meliputi pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, perluasan lahan pertanian terutama di luar Jawa, pencegahan konversi lahan terutama di Jawa, pengembangan jalan usahatani dan jalan produksi serta infrastruktur lainnya, seperti pelabuhan, pergudangan, energi dan lain-lain.
- (3) Kebijakan perlindungan/stabilisasi harga komoditas pertanian. Kepastian harga merupakan hal penting bagi kelangsungan usaha pertanian dan peternakan.
- (4) Kebijakan di bidang transportasi yang terkait erat dengan peningkatan produktifitas, mutu, dan daya saing produk pertanian yang pada umumnya mudah rusak (*perishable*).
- (5) Kebijakan pembiayaan untuk mengembangkan lembaga keuangan yang khusus melayani sektor pertanian, lembaga keuangan mikro, pembiayaan pola syariah, dan lainnya. Kebijakan ini perlu memecahkan persoalan ketiadaan agunan (*cash colateral*) para petani dan peternak baik skala menengah dan kecil.
- (6) Kebijakan perdagangan yang memfasilitasi kelancaran pemasaran baik di pasar dalam negeri maupun ekspor. Selain itu, untuk melindungi sektor pertanian dari persaingan di pasar dunia, diperlukan: (a) memperjuangkan konsep *Strategic Product* (SP) dalam forum WTO; (b) penerapan tarif dan

hambatan non-tarif untuk komoditas-komoditas beras, kedelai, jagung, gula, beberapa produk hortikultura dan peternakan.

- (7) Kebijakan pengembangan industri yang lebih menekankan pada agroindustri skala kecil di perdesaan dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani.
- (8) Kebijakan investasi yang kondusif untuk lebih mendorong minat investor dalam sektor pertanian.
- (9) Pembiayaan pembangunan yang lebih memprioritaskan anggaran untuk sektor pertanian dan sektor-sektor pendukungnya.
- (10) Perhatian pemerintah daerah pada pembangunan pertanian meliputi: infrastruktur pertanian, pemberdayaan penyuluh pertanian, pengembangan instansi lingkup pertanian, menghilangkan berbagai pungutan yang mengurangi daya saing pertanian, serta alokasi APBD yang memadai serta didukung dengan perencanaan pertanian jangka menengah dan panjang.

Bab 6

**SASARAN PEMBANGUNAN
PERTANIAN TAHUN 2007**



Bab 6

SASARAN PEMBANGUNAN PERTANIAN TAHUN 2007

6.1. Nasional

Sasaran nasional revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan yang ingin dicapai pada tahun 2007 adalah: (i) pertumbuhan sektor pertanian secara luas sebesar 2,7 persen; (ii) mengamankan dan memantapkan ketahanan pangan nasional; (iii) mempercepat berkembangnya diversifikasi ekonomi di perdesaan dan meningkatkan pendapatan petani; dan (iv) berkembangnya energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada konsumsi BBM.

6.2. Departemen Pertanian

Untuk tahun 2007, sektor pertanian dalam lingkup yang lebih sempit (subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) ditargetkan dapat tumbuh dengan laju 3,37 persen, sehingga kontribusi PDB sektor pertanian adalah sebesar 11,35 persen dan nilai PDB sektor pertanian menjadi Rp. 297,9 triliun.

Sumber pertumbuhan sektor pertanian tersebut terutama diharapkan berasal dari pertumbuhan subsektor tanaman pangan sebesar 1,08 persen, hortikultura 3,27 persen, perkebunan sebesar 6,26 persen, dan peternakan sebesar 4,45 persen.

Pada tahun 2007, komoditas yang akan dibiayai oleh APBN akan difokuskan kepada 32 komoditas strategis di subsektor pertanian yaitu: (1) tanaman pangan 5 komoditas (padi, jagung, kedele, kacang tanah, dan ubi kayu); (2) hortikultura 10 komoditas (kentang, cabe merah, bawang merah, mangga, manggis, pisang, durian, jeruk, anggrek, dan rimpang); (3) perkebunan 11 komoditas (karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, kakao, jambu mete, lada, tebu, serat, tembakau, dan cengkeh); dan (4) peternakan 6 komoditas (sapi potong, kambing, domba, ayam buras, itik, dan babi).

**KOMODITAS PRIORITAS DEPARTEMEN PERTANIAN
TAHUN 2007**

No.	SUBSEKTOR	KOMODITAS
1.	Tanaman Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Padi 2. Jagung 3. Kedele 4. Kacang tanah 5. Ubi kayu
2.	Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kentang 2. Cabe merah 3. Bawang merah 4. Mangga 5. Manggis 6. Pisang 7. Durian 8. Jeruk 9. Anggrek 10. Rimpang
3	Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karet 2. Kelapa 3. Kelapa sawit 4. Kopi 5. Kakao 6. Jambu mete 7. Lada 8. Tebu 9. Serat 10. Tembakau 11. Cengkeh
4	Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sapi potong 2. Kambing 3. Domba 4. Ayam buras 5. Itik 6. Babi

Sasaran kuantitatif produksi beberapa komoditas utama pada tahun 2007 adalah:

- (1) Sasaran produksi komoditas tanaman pangan meliputi: padi sebesar 57,4 juta ton GKG; jagung 13,54 juta ton; kedele 0,95 juta ton; kacang tanah 0,96 juta ton; kacang hijau 0,38 juta ton, ubi jalar 1,98 juta ton dan ubi kayu 20,4 juta ton.
- (2) Sasaran produksi hortikultura, mencakup: kentang sebesar 1,13 juta ton; cabe 1,17 ton; bawang merah 0,95 juta ton; kubis sebesar 1,51 juta ton; tomat 0,80 juta ton; dan wortel 0,41 juta ton
- (3) Sasaran produksi buah-buahan mencakup: pisang sebesar 5,23 juta ton; mangga 1,93 juta ton; jeruk 1,74 juta ton; durian 0,97 juta ton; pepaya 0,75 juta ton; nenas 0,83 juta ton dan alpukat 0,34 juta ton.
- (4) Sasaran produksi komoditas peternakan meliputi: sapi sebesar 473,1 ribu ton; kerbau 46,4 ribu ton; babi 200,2 ribu ton; kambing/domba 133,3 ribu ton; unggas 1.469,2 ribu ton; telur 1.350,8 ribu ton dan susu 798 ribu ton.
- (5) Sasaran produksi komoditas perkebunan: kelapa sawit (CPO) 15,20 juta ton, kelapa 3,35 juta ton, kopi 0,82 juta ton, kakao

0,71 juta ton, karet 2,25 juta ton; gula 2,8 juta ton, tembakau 0,27 juta ton dan lada 0,11 juta ton.

Selain itu, di tahun 2007 sasaran penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian diharapkan bertambah sebesar 2,6 juta orang sehingga menjadi sebesar 42,61 juta orang dengan produktivitas tenaga kerja pertanian tumbuh 1,54 persen. Penyebaran tenaga kerja pertanian di tahun 2007 tersebut yaitu: tanaman pangan sebanyak 26,52 juta orang; hortikultura 4,06 juta orang; perkebunan 7,04 juta orang; dan peternakan 4,99 juta orang.

Indikator keberhasilan pembangunan pertanian tahun 2007 adalah:

- (1) Surplus neraca perdagangan pertanian tahun 2007 adalah US\$ 9,96 milyar atau meningkat sebesar 24,62 persen dari tahun 2006 yang diperkirakan US\$ 8,0 milyar.
- (2) Menurunnya jumlah penduduk miskin di perdesaan dari perkiraan sementara 17,92 persen pada tahun 2006 menjadi 16,59 persen pada tahun 2007.
- (3) Meningkatnya ketahanan pangan dan menurunnya jumlah penduduk rawan pangan 1 (satu) persen per tahun.
- (4) Meningkatnya daya beli dan kesejahteraan petani.
- (5) Meningkatnya PDB sektor pertanian.

Bab 7
PROGRAM DAN KEGIATAN
DEPARTEMEN PERTANIAN TAHUN 2007



Bab 7

PROGRAM DAN KEGIATAN DEPARTEMEN PERTANIAN TAHUN 2007

7.1. Program dan Kegiatan

Pada setiap tahunnya, Departemen Pertanian telah menetapkan tiga program utama pembangunan pertanian yang sesuai dengan RPJMN tahun 2005-2009, yaitu: (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, (2) Program Pengembangan Agribisnis, dan (3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. Disamping ke-3 program utama yang dilakukan tiap tahun tersebut, dalam rangka memperlancar fasilitasi pembangunan pertanian pada tahun 2007 telah pula ditetapkan 2 program pendukung, yaitu (4) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, dan (5) Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan.

(1). Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Tujuan program Peningkatan Ketahanan Pangan (PKP) adalah agar masyarakat memperoleh pangan yang cukup setiap saat,

sehat dan halal. Kegiatan operasional program PKP tahun 2007 mencakup kegiatan pokok: (1) peningkatan produksi dan produktivitas, (2) peningkatan distribusi dan akses pangan, (3) konsumsi, diversifikasi dan keamanan pangan, dan (4) kegiatan pendukung.

a. Peningkatan Produksi dan Produktivitas

- (a) Pengembangan kelembagaan perbenihan, penyediaan dan penggunaan benih tanaman unggul bermutu dan peternakan
- (b) Pengembangan intensifikasi padi-padian
- (c) Pengembangan intensifikasi kacang-kacangan dan umbi-umbian
- (d) Pengembangan penyediaan prasarana dan sarana pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian dan pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida serta penyempurnaan kebijakan pupuk
- (e) Perluasan areal tanam dan areal panen, optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan lahan dan air
- (f) Penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
- (g) Peningkatan mutu dan keamanan pangan

- (h) Pengembangan perlindungan tanaman dan ternak dan pengendalian wabah/flu burung pada hewan
- (i) Pencegahan penyebaran dan tindakan karantina terhadap media pembawa penyakit flu burung
- (j) Pengembangan sistem perkarantinaaan pertanian dan pengawasan keamanan pangan.

b. Peningkatan distribusi dan akses pangan

- (a) Pemantauan dan analisis harga pangan strategis
- (b) Pemantauan dan analisis pangan masyarakat
- (c) Pengembangan model distribusi pangan yang efisien
- (d) Koordinasi dan pengembangan cadangan pangan
- (e) Pemantauan situasi ketersediaan pangan
- (f) Pengembangan sistem koordinasi distribusi pangan
- (g) Stabilisasi harga pangan strategis.

c. Konsumsi, diversifikasi dan keamanan pangan

- (a) Pengembangan pangan lokal
- (b) Kampanye/sosialisasi pola konsumsi pangan beragam, bergizi dan seimbang
- (c) Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan kebutuhan pangan

- (d) Pembinaan dan pengawasan standardisasi, akreditasi dan pengendalian mutu
- (e) Pengembangan kewaspadaan penanggulangan rawan pangan
- (f) Pembinaan dan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu obat Hewan/Pakan/Produk ternak
- (g) Bimbingan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber gizi keluarga
- (h) Pengembangan keamanan pangan.

d. Kegiatan Pendukung

- (a) Pengembangan statistik pangan dan pertanian
- (b) Pembinaan kerjasama internasional
- (c) Penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumberdaya genetik
- (d) Penelitian dan pengembangan komoditas
- (e) Penelitian dan pengembangan mekanisasi pertanian
- (f) Penelitian dan pengembangan sosial ekonomi dan kebijakan pertanian
- (g) Penelitian dan pengembangan sumberdaya tanah, air dan agroklimat
- (h) Pengembangan sumberdaya informasi Iptek, diseminasi dan penjangkaran umpan balik

- (i) Pembinaan dan pengembangan manajemen pembangunan pertanian
- (j) Meningkatkan motivasi keterlibatan masyarakat dalam peningkatan ketahanan pangan

(2). Program Pengembangan Agribisnis

Program Pengembangan Agribisnis (PA) ditujukan untuk memfasilitasi: (1) berkembangnya usaha pertanian yang produktif dan efisien untuk menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi, baik di pasar domestik maupun internasional, dan (2) meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian nasional, terutama melalui peningkatan devisa dan pertumbuhan PDB.

Kegiatan operasional program PA tahun 2007 terdiri dari 3 (tiga) kegiatan pokok yaitu: (1) peningkatan kualitas pertumbuhan produksi pertanian, (2) pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil, dan (3) pengembangan pasca panen dan peningkatan mutu komoditas ekspor.

a. Peningkatan kualitas pertumbuhan produksi pertanian

- (a) Pengembangan infrastruktur pertanian dan perdesaan

- (b) Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana usaha
- (c) Pengembangan kelembagaan layanan agribisnis
- (d) Pengembangan varietas/jenis ternak unggul.
- (e) Pengembangan komoditas komersial
- (f) Pengembangan sentra produksi komoditas unggulan
- (g) Penerapan *good agriculture practices*
- (h) Pengembangan produk sesuai standar internasional
- (i) Peningkatan mutu produk pertanian
- (j) Pengembangan pola kemitraan usaha bidang pertanian, dan pola *contract farming*.

b. Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil

- (a) Pengembangan kelembagaan dan informasi pasar
- (b) Pengembangan kerjasama dan perdagangan internasional
- (c) Pengembangan kelembagaan sistem jaminan mutu produk pertanian
- (d) Pengembangan promosi produk pertanian
- (e) Pengembangan agroindustri perdesaan

c. Pengembangan Pasca Panen dan Peningkatan Mutu Komoditas Ekspor

- (a) Penyusunan peta pewilayahan komoditas

- (b) Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya, pasca panen dan mekanisasi pertanian
- (c) Pengkajian aspek sosial ekonomi dan kebijakan komoditas
- (d) Pengembangan teknologi pasca panen
- (e) Sosialisasi dan penerapan peraturan perkarantinaaan dan SPS
- (f) Penyelenggaraan perkarantinaaan hewan dan tumbuhan serta akselerasi ekspor komoditas pertanian
- (g) Penyuluhan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan kewirausahaan
- (h) Sinkronisasi, koordinasi dan penyelarasan pelaksanaan kegiatan program pengembangan agribisnis.

(3). Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (PKP) bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumberdaya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan, dan perlindungan terhadap petani. Kegiatan operasional program PKP tahun 2007 dibagi atas: (1) peningkatan kapasitas, posisi tawar petani dan kualitas SDM pertanian, (2) pemberdayaan kelembagaan pertanian, (3) bimbingan

dalam peningkatan promosi dan proteksi komoditas pertanian (legislasi dan regulasi), dan (4) pengembangan sistem pendukung.

a. Peningkatan kapasitas, posisi tawar petani dan kualitas SDM pertanian

- (a) Penyelenggaraan pendidikan pertanian bagi petani
- (b) Pengembangan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan bagi petani
- (c) Perlindungan petani dan usaha pertanian.
- (d) Pengembangan diversifikasi usaha rumah tangga berbasis pertanian
- (e) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan program
- (f) Peningkatan layanan pembiayaan dan informasi bagi petani
- (g) Pengembangan pendidikan dan pelatihan sumberdaya pertanian.

b. Pemberdayaan kelembagaan pertanian

- (a) Pengembangan dan penguatan kelembagaan petani.
- (b) Penguatan kelembagaan penyuluhan.
- (c) Pengembangan kelembagaan pertanian perdesaan (keuangan, kios, jasa koperasi, asosiasi)

- (d) Pemberdayaan masyarakat dan lembaga sosial kemasyarakatan dalam pengelolaan lingkungan hidup
- (e) Menggali dan mengembangkan budaya masyarakat dalam konservasi air
- (f) Pembinaan kesejahteraan pekebun, pengembangan pola pembiayaan/ model usaha kelompok.

c. Bimbingan dalam peningkatan promosi dan proteksi komoditas pertanian (legislasi dan regulasi)

- (a) Kebijakan perlindungan petani dan usaha pertanian
- (b) Kebijakan promosi investasi dan insentif usaha

d. Pengembangan sistem pendukung

- (a) Advokasi penataan hak pemilikan, sertifikasi dan pencegahan konversi lahan.
- (b) Sinkronisasi kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan petani.
- (c) Koordinasi penanganan daerah bencana dam, konflik, tertinggal dan perbatasan
- (d) Penyempurnaan perstatistikan, sistem informasi dan data pertanian
- (e) Pelaksanaan penyusunan program serta monitoring dan evaluasi (Monev) program pembangunan pertanian.

(4). Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

Program ini ditujukan untuk meningkatkan pengawasan aparatur negara dan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan pelaksanaan pembangunan pertanian. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah terwujudnya sistem pengawasan yang akuntabel di lingkungan pertanian.

(5). Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja Departemen Pertanian dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan umum pembangunan pertanian. Sedangkan sasaran program ini adalah: (1) meningkatnya manajemen pemerintahan yang dapat mendukung peningkatan kinerja Departemen Pertanian dan para pegawainya, dan (2) meningkatnya penerapan prinsip *good governance* di Departemen Pertanian.

Program pembangunan Departemen Pertanian Tahun 2007	
No.	Program
Program Utama	
1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2.	Program Pengembangan Agribisnis
3.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program Pendukung	
4.	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
5.	Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan

7.2. Implementasi Operasional

Dalam implementasinya, berbagai rencana kegiatan Departemen Pertanian tahun 2007 tersebut dioperasionalkan dalam payung 28 (dua puluh delapan) kegiatan utama yang diyakini mampu mendorong percepatan pertumbuhan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani serta merupakan kristalisasi dari berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan pembangunan pertanian hingga saat ini. Ke dua puluh delapan kegiatan utama dimaksud akan menjadi unsur utama yang harus terakomodasi dalam program dan kegiatan Departemen Pertanian pada tahun 2007.

Kedua puluh delapan (28) kegiatan pokok pada tahun 2007 secara singkat diterangkan sebagai berikut:

(1). Pembentukan dan Pengaktifan Kelompok Tani dan Gapoktan

Dalam rangka memperkuat kelembagaan pertanian dan mempermudah pembinaan terhadap kelompok tani, maka pada tahun 2007 akan dilakukan Revitalisasi Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di tingkat perdesaan. Revitalisasi ini dimaksudkan untuk membentuk dan atau mengaktifkan kembali serta memperkuat kelembagaan petani yang ada. Dengan pola ini diharapkan pembinaan pemerintah kepada petani akan semakin terfokus dengan sasaran yang jelas. Pada tahun 2006 kegiatan ini dimulai dengan mengidentifikasi terhadap kelompok-kelompok tani dan Gapoktan yang ada atau mempersiapkan pembentukannya pada desa-desa yang belum ada Gapoktan. Selanjutnya pada tahun 2007 kegiatan diarahkan pada pengaktifan 22.000 Gapoktan. Apabila pengembangan Gapoktan ini dinilai berhasil maka pada tahun-tahun selanjutnya akan dilakukan pembentukan/pengaktifan Gapoktan lainnya, dengan target akhir terbangun dan aktifnya 66.000 Gapoktan hingga akhir tahun 2009.

(2). Bantuan Benih kepada Petani

Selama ini penggunaan benih/bibit unggul bermutu di tingkat petani masih rendah. Dengan demikian kegiatan ini

dimaksudkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas melalui penggunaan benih/bibit unggul bermutu bagi petani, mempermudah akses petani miskin terhadap benih/bibit unggul serta memperluas penyebaran benih/bibit unggul pada daerah-daerah kantong kemiskinan, daerah rawan pangan, daerah terisolir dan lainnya. Upaya ini akan dapat menekan harga benih/bibit bermutu agar dapat diakses petani/peternak.

(3). Penjaminan Kredit Pertanian

Selama ini petani/peternak kesulitan mengakses modal dari perbankan karena minimnya *cash collateral*. Untuk membangun sistem pembiayaan yang mudah diakses oleh petani/peternak, diperlukan skim pelayanan pembiayaan pertanian yang mudah diakses dan mampu memutar roda perekonomian di perdesaan. Untuk itu pemerintah perlu menyediakan dana dasar di perbankan sebagai premi penjaminan atas kredit yang disalurkan kepada petani sasaran oleh Bank Pelaksana. Dana tersebut selanjutnya juga dapat digunakan sebagai *risk-sharing* atas kredit petani, dan jasa giro-nya dapat diakumulasikan ke dalam cadangan pokok atau dikembalikan ke negara sebagai PNBK. Kegiatan ini sebagai pemantapan dan perluasan dari kegiatan yang sudah dimulai tahun 2006.

(4). Bantuan Bunga Kredit Modal Investasi

Pada tahun 2007, kebutuhan investasi untuk mengembangkan subsektor perkebunan dan subsektor tanaman pangan diperkirakan masing-masing mencapai sebesar Rp 10,0 triliun, atau total untuk kedua subsektor Rp 20,0 triliun. Dalam rangka merangsang investasi di kedua subsektor tersebut diperlukan bantuan bunga kredit modal investasi.

(5). Stabilisasi/Kepastian Harga Komoditas Primer melalui Dana Penguatan Modal – Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM – LUEP)

Beras merupakan komoditas strategis didalam kehidupan sosial ekonomi nasional. Satu kendala utama usahatani tanaman pangan terutama padi adalah terjadinya fluktuasi harga padi/gabah yang ekstrim menurut musim tanam. Pada saat panen raya biasanya terjadi di musim hujan, harga padi/gabah menurun dan sebaliknya pada saat paceklik harga meningkat. Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan dalam rangka stabiliasi harga pangan tersebut, antara lain dengan meningkatkan peran Bulog dalam pembelian gabah petani serta fasilitasi pemerintah melalui pengembangan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM-LUEP). Kegiatan DPM-LUEP telah dilaksanakan sejak tahun 2003

dan telah menunjukkan keberhasilan. Untuk itu, pada tahun 2007 kegiatan ini akan lebih diperluas jangkauannya.

(6). Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian

Untuk menarik investor masuk ke sektor pertanian, mempermudah aksesibilitas dan distribusi sarana produksi dan output pertanian, maka diperlukan infrastruktur yang memadai. Selama ini investasi pemerintah di bidang infrastruktur sangat minim, sehingga banyak jalan usahatani, jalan produksi, jaringan irigasi yang rusak. Untuk itu diperlukan kegiatan pembangunan dan atau rehabilitasi jalan usahatani, jalan produksi, jaringan irigasi tingkat usahatani, jaringan irigasi perdesaan, tata air mikro, irigasi tanah dangkal, sumur resapan, embung, waduk, dam parit, terasering dan lainnya.

(7). Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) dan Lembaga yang Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3)

Salah satu kendala utama petani di Indonesia dalam mengembangkan usahanya adalah terbatasnya modal dan lemahnya kemampuan akses terhadap sumber permodalan. Untuk meningkatkan *bargaining power* petani, pemberdayaan petani akan dilakukan dengan pendekatan kelompok agar mempermudah

pembinaan dan pengembangan usahanya dapat mencapai skala ekonomi. Dalam rangka mengatasi permodalan petani, akan disalurkan stimulan penguatan modal usaha kelompok (PMUK) atau yang selama ini dikenal dengan nama Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Kegiatan PMUK ini akan disertai dengan kegiatan pengembangan kelembagaan petani, kemitraan, peningkatan akses terhadap sumberdaya, teknologi dan pasar serta peningkatan kualitas SDM petani.

Di samping kelompok tani, di tingkat perdesaan terdapat pula lembaga yang selama ini tumbuh dan mengakar di masyarakat, atau yang dikenal dengan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3). Sebagian besar LM3 tersebut berbasis keagamaan: pondok pesantren, seminari, paroki, pasraman, vihara, pura, subak dan lainnya. Sebagian LM3 juga bergerak di bidang agribisnis. LM3 yang bergerak di bidang agribisnis ini dapat dijadikan sebagai percontohan dan pusat-pusat pengembangan agribisnis di lokalita setempat.

(8). Pengembangan Bahan Baku Bio-Energi

Indonesia sebagai negara agraris memiliki aneka ragam penghasil minyak nabati seperti kelapa sawit, kelapa, jarak pagar sebagai bahan baku diesel (substitusi solar) dan minyak bakar

(substitusi minyak tanah). Disamping itu, ubi kayu, sorgum, jagung dan tetes tebu juga dapat dijadikan sebagai bahan baku gasohol (substitusi premium) dan penghasil limbah organik (biomassa). Potensi tersebut perlu terus dikembangkan dengan menyediakan bahan baku produksi tanaman penghasil bio-energi dan sarana pengolahannya. Kegiatan ini telah dirintis pada tahun 2006 dan akan ditingkatkan pada tahun 2007.

(9). Penguatan Kelembagaan Perbenihan/Perbibitan

Dalam rangka memperkuat dan memperlancar penyediaan benih/bibit pertanian diperlukan dukungan kelembagaan perbenihan/perbibitan yang memadai baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk itu akan dibentuk pusat-pusat perbenihan tanaman pangan di wilayah berpotensi, dibarengi dengan kegiatan penguatan lembaga perbenihan/perbibitan yang ada baik di pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan mengacu pada sistem perbenihan/perbibitan nasional.

(10). Perbaikan Mekanisme Subsidi Pupuk

Saat ini subsidi pupuk pada petani dilakukan melalui subsidi gas yang diberikan kepada pabrik. Dengan terbatasnya pasokan gas dan perbedaan harga yang sangat tinggi antara gas dalam negeri

dengan harga ekspor, menyebabkan pasokan gas untuk pabrik pupuk menjadi berkurang dan diikuti oleh sulitnya bagi pabrik untuk meningkatkan produksi pupuk. Sementara, harga pupuk bersubsidi yang dijual di tingkat pengecer kebanyakan berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Hal ini antara lain disebabkan oleh mahalnya biaya transportasi dan tidak seragamnya ongkos angkut pada tiap daerah. Untuk itu pada tahun 2007 perlu dilakukan mekanisme pengalihan subsidi dari subsidi gas menjadi subsidi harga dan subsidi transportasi.

(11). Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), Penyakit Hewan dan Perkarantinaan

Akhir-akhir ini sektor pertanian sering dilanda musibah serangan wabah hama penyakit tanaman antara lain: wereng coklat, hama sexava, hama PBK, penyakit ternak seperti anthrax, penyakit mulut dan kuku, serta virus flu burung dan lainnya. Untuk itu salah satu prioritas kegiatan pembangunan pertanian pada tahun 2007 diarahkan untuk pencegahan dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan ternak tersebut.

(12). Pengembangan Kegiatan Magang Sekolah Lapang (SL) Pertanian

Metode yang dirasakan praktis dan mudah diikuti petani dalam alih teknologi adalah metode Sekolah Lapang (SL) Pertanian. Disamping mudah diikuti metode ini juga menarik bagi petani karena dapat langsung diterapkan oleh petani saat mereka melakukan aktivitas usahanya. Untuk itu pada tahun 2007 akan diperbanyak kegiatan-kegiatan SL Pertanian. Selanjutnya SL Pertanian tersebut akan diarahkan menjadi media *training of trainers* (TOT) dengan sasaran lebih berkembangnya SL Pertanian yang diinisiatif oleh lulusan TOT. Dengan demikian pada masa yang akan datang pemerintah akan lebih banyak mengarahkan kegiatan SL Pertanian ini, tidak lagi perlu membentuk SL-SL baru yang difasilitasi pemerintah.

(13). Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Petani dan Revitalisasi Penyuluhan

Selama ini terdapat kecenderungan terjadi transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke non-pertanian, dimana para pemuda/pemudi di perdesaan lebih tertarik bekerja sebagai buruh di sektor industri maupun di sektor informal, sehingga penduduk yang masih bekerja di sektor pertanian tinggal yang berumur tua. Untuk menarik minat para pemuda/pemudi kembali membangun

pertanian di perdesaan, diperlukan langkah-langkah kegiatan antara lain melalui pendidikan, pelatihan, magang, studi banding dan lainnya.

Disamping itu dalam rangka revitalisasi penyuluhan kegiatan diarahkan pada pengembangan dan pemantapan BPP yang ada, rekrutmen tenaga penyuluh, pelatihan dan pendampingan serta perbaikan metodologi penyuluhan yang disesuaikan dengan dinamika yang berkembang. Disamping itu di tingkat perdesaan akan dikembangkan *Community Center for Agribusiness* yang merupakan kelembagaan layanan informasi pertanian di tingkat desa untuk meningkatkan akses petani terhadap informasi dan teknologi.

(14). Pengembangan Kegiatan Pelatihan dan Pendidikan Pertanian

Rendahnya kualitas sumberdaya manusia merupakan kendala yang serius dalam pembangunan pertanian. Tingkat pendidikan dan keterampilan petani yang masih rendah memerlukan latihan, khususnya pada aspek yang bersifat praktis dan langsung berhubungan dengan aktivitas usaha ekonomi petani. Untuk itu pada tahun 2007 akan dikembangkan kegiatan berbagai pelatihan bagi petani yang materinya disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan petani.

(15). Mekanisasi Kegiatan Produksi Komoditas Pertanian Primer (Pra Panen)

Dalam rangka mengatasi kebutuhan tenaga kerja, khususnya di luar Jawa serta mengantisipasi perluasan areal pertanian yang telah diprogramkan, maka diperlukan teknologi produksi pertanian yang bisa menghemat pemakaian tenaga kerja manusia. Oleh karena itu mekanisasi pada kegiatan produksi (pra-panen) mutlak dibutuhkan. Untuk itu pada tahun 2007 introduksi teknologi mekanisasi pertanian akan menjadi kegiatan terobosan dalam rangka mempercepat kegiatan proses produksi.

(16). Mekanisasi Kegiatan Pertanian Pasca Panen

Untuk mengurangi kehilangan, meningkatkan mutu hasil dan nilai tambah produk pertanian serta penanganan pemasaran, akan dikembangkan berbagai sarana pasca panen seperti: (1) pengembangan sarana penyelamatan pasca panen (pengeringan melalui terpalisasi dan pengembangan sarana pengering surya), dan (2) sarana pergudangan.

(17). Revitalisasi Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok UPJA (KUPJA)

Penggunaan alsin pertanian telah dirasakan manfaatnya oleh petani khususnya tanaman pangan dalam mempercepat pengolahan

tanah, pengendalian hama, panen dan perontokan khususnya di daerah intensifikasi. Namun demikian jumlah alsin pertanian masih sangat sedikit dibanding dengan luas lahan yang ada. Disamping itu, pemakaian alsin juga belum optimum khususnya dalam kegiatan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (KUPJA). Untuk itu salah satu kegiatan terobosan yang akan dilaksanakan pada tahun 2007 adalah revitalisasi UPJA dan KUPJA. Berkaitan dengan hal ini perlu diupayakan penyediaan penguatan modal pengadaan alsintan bagi petani-peternak berupa pembayaran uang muka (*down payment*).

(18). Pengembangan Agroindustri Pedesaan

Produksi pertanian di pedesaan kebanyakan masih dalam bentuk produk primer. Untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus membuka kesempatan kerja dan berusaha di bidang usaha pertanian, maka diperlukan penumbuhan industri berbasis pertanian (agroindustri) di tingkat pedesaan. Upaya pengembangan agroindustri di tingkat pedesaan disamping untuk sarana peningkatan nilai tambah juga ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan menekan tingkat urbanisasi.

(19). Pengembangan Kegiatan Pemasaran Komoditas Pertanian

Dalam rangka pengembangan pemasaran produk pertanian, perlu dikembangkan berbagai sarana dan sistem pemasaran, khususnya untuk daerah luar Jawa. Kegiatan yang diperlukan pada tahun 2007 dalam rangka pengembangan pemasaran ini adalah: (1) *Auction market*, khususnya untuk komoditas perkebunan, (2) pengembangan *grading* dan *packaging house* yang dilengkapi dengan *cold storage*, terutama untuk komoditas hortikultura, dan (3) pengembangan pasar dan pusat pelelangan bunga di Jakarta dan Surabaya.

(20). Pengembangan Fasilitas Pelayanan Terpadu Agribisnis

Untuk mendorong investasi di bidang pertanian dibutuhkan fasilitasi berbagai pihak sesuai dengan fungsi, kompetensi dan kapasitas masing-masing. Fasilitas tersebut dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta Nasional Besar dan Multinasional. Sinergi semua elemen sangat diperlukan, mengingat keberhasilan investasi tergantung pada ketersediaan faktor pendorong rantai pasokan (*supply chain*) secara optimal.

(21). Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian

Produksi berbagai komoditas pertanian selama beberapa dekade ini telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peningkatan produksi tersebut diperoleh dari hasil peningkatan luas areal tanam atau peningkatan produktivitas. Kenyataan menunjukkan bahwa berbagai produktivitas komoditas pertanian masih jauh dari potensinya, terutama pada komoditas perkebunan rakyat. Di lain pihak, walaupun komoditas tanaman pangan relatif lebih maju, namun pengembangan komoditas ini juga dihadapkan pada kendala keterbatasan sumberdaya lahan dan semakin tingginya *opportunity cost* karena semakin tajamnya kompetisi penggunaan lahan dengan non-pertanian (terutama di pulau Jawa). Keberhasilan peningkatan produktivitas sangat berkorelasi dengan inovasi teknologi (penggunaan varietas/klon unggul). Untuk itu pada tahun 2007 peningkatan produksi berbagai komoditas pertanian akan dilakukan melalui perluasan areal tanam, terutama diarahkan di luar Pulau Jawa dan peningkatan produktivitas serta intensitas tanam.

(22). Peningkatan Kegiatan Eksibisi, Perlombaan dan Penghargaan Pertanian

Dalam rangka penyebarluasan informasi, promosi, dan pemasyarakatan berbagai keberhasilan dan program-program

pembangunan pertanian kepada publik, maka pada tahun 2007 kegiatan-kegiatan berupa eksebisi maupun berbagai "fair" akan semakin diperbanyak. Kegiatan eksebisi ini akan dilakukan berjenjang dari tingkat bawah yaitu desa/kecamatan – Kabupaten – Propinsi sampai tingkat Nasional. Kegiatan eksebisi terbuka untuk umum dan juga diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan atau mendorong keterlibatan masyarakat seperti misalnya lomba/kontes ternak (kabung pejantan, sapi) unggul, buah bermutu, dan lain sebagainya.

(23). Pengembangan Pusat Pembibitan Sapi

Dalam dekade terakhir ini impor sapi hidup dan daging sapi masih sangat tinggi, bahkan pernah mencapai lebih dari 420.000 ekor pada tahun 2002, walaupun saat ini ada penurunan impor. Namun demikian, penurunan impor tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan populasi di dalam negeri, tetapi bahkan ada kecenderungan penurunan populasi sapi di dalam negeri yang disebabkan meningkatnya pemotongan sapi betina produktif dan muda/kecil. Keadaan demikian diperkirakan akan terus berlangsung apabila tidak ada terobosan dalam pengembangan sapi di Indonesia. Untuk itu pada tahun 2007 akan dilakukan kegiatan terobosan revitalisasi perbibitan sapi melalui pengembangan pusat perbibitan

sapi (seperti *Village Breeding Center*) yang dibina oleh UPT Daerah, antara lain: di Gowa, Pasuruan, Lombok Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.

(24). Pengembangan Pertanian Terpadu Tanaman-Ternak, Kompos, dan Biogas

Salah satu kegiatan terobosan yang akan dilakukan pada tahun 2007 adalah pengembangan pilot-pilot percontohan integrasi tanaman-ternak, kompos dan biogas di tingkat perdesaan. Kegiatan seperti ini sudah dikembangkan oleh Badan Litbang Pertanian pada dua tahun terakhir ini, dan ke depan akan semakin diperluas cakupan komoditas dan wilayahnya. Kegiatan pilot atau percontohan tersebut di lingkungan Departemen Pertanian akan dilakukan dan atau dikoordinasikan oleh Badan Litbang Pertanian.

(25). Pengembangan Pertanian Organik dan Lingkungan Hidup

Pembangunan pertanian harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan, dengan memperhatikan dimensi yang lebih luas dan dilakukan secara holistik antara lain mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, kelembagaan, maupun ekologi. Praktek-praktek pengelolaan pertanian yang mengeksploitasi sumberdaya secara berlebihan dengan menggunakan pupuk dan pestisida kimia telah berdampak

terjadinya *levelling off*, dimana peningkatan produksi tidak setara dengan besarnya input yang digunakan dan telah berdampak negatif terhadap kesuburan lahan (tanah menjadi tandus dan rentan terhadap serangan hama penyakit). Untuk memulihkan kesuburan tanah, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan lingkungan, maka kegiatan pengembangan pertanian organik akan semakin dikembangkan dan diperluas.

(26). Peremajaan Tanaman Perkebunan Rakyat, khususnya Karet, Kopi, Sawit, Kakao, dan Jambu Mete

Komoditas utama yang saat ini banyak diusahakan dalam bentuk perkebunan rakyat antara lain karet, sawit dan kakao. Namun sebagai negara dengan luas areal perkebunan terbesar di dunia, Indonesia masih menghadapi kendala rendahnya produktivitas, terutama pada perkebunan rakyat yang merupakan mayoritas. Rendahnya produktivitas ini terutama sebagai akibat banyaknya tanaman yang telah tua, rusak dan tidak produktif lagi, penggunaan bibit bukan klon unggul, dan kondisi kebun yang tidak terawat. Untuk itu pada tahun 2007 akan dilakukan peremajaan dan rehabilitasi perkebunan rakyat nasional.

(27). Pengembangan dan Diseminasi Inovasi Mendukung Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian perlu didukung oleh teknologi, sehingga dapat dipercepat dan memberikan hasil yang optimal. Untuk keperluan ini, upaya percepatan penemuan inovasi dan alih teknologi sangat dibutuhkan. Upaya pengembangan dan diseminasi teknologi akan dilaksanakan oleh unit-unit penelitian yang ada di lingkup Departemen Pertanian.

(28). Penerapan dan Pemanapan Prinsip Good Governance, Kebijakan dan Regulasi.

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembangunan pertanian, sinkronisasi antar subsektor dan lintas sektor, serta koordinasi antara pusat dan daerah, dikembangkan manajemen yang terpadu yang mencakup aspek perencanaan, implementasi, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan yang sesuai dengan prinsip *good governance*.

Dua Puluh Delapan Kegiatan Utama Departemen Pertanian Tahun 2007

No.	Kegiatan Utama
1.	Pembentukan dan Pengaktifan Kelompok Tani dan Gapoktan
2.	Bantuan Benih kepada Petani
3.	Penjaminan Kredit Pertanian
4.	Bantuan Bunga Kredit Modal Investasi
5.	Stabilisasi/Kepastian Harga Komoditas Primer melalui Dana Penguatan Modal – Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM-LUEP)
6.	Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian
7.	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) dan Lembaga Mandiri yang Mengakar Di Masyarakat (LM3)
8.	Pengembangan Bahan Baku Bio-Energi
9.	Penguatan Kelembagaan Perbenihan/Perbibitan
10.	Perbaikan Mekanisme Subsidi Pupuk
11.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), Penyakit Hewan dan Perkarantinaan
12.	Pengembangan Kegiatan Magang Sekolah Lapang (SL) Pertanian
13.	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Petani dan Revitalisasi Pertanian
14.	Pengembangan Kegiatan Pelatihan dan Pendidikan Pertanian
15.	Mekanisasi Kegiatan Produksi Komoditas Pertanian Primer (Pra Panen)
16.	Mekanisasi Kegiatan Pertanian Pasca Panen
17.	Revitalisasi Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok UPJA (KUPJA)
18.	Pengembangan Agroindustri Perdesaan
19.	Pengembangan Kegiatan Pemasaran Komoditas Pertanian
20.	Pengembangan Fasilitas Pelayanan Terpadu Agribisnis
21.	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian
22.	Peningkatan Kegiatan Eksibisi, Perlombaan dan Penghargaan Pertanian
23.	Pengembangan Pusat Pembibitan Sapi
24.	Pengembangan Pertanian Terpadu Tanaman-Ternak, Kompos dan Biogas
25.	Pengembangan Pertanian Organik dan Lingkungan Hidup
26.	Peremajaan Tanaman Perkebunan Rakyat, khususnya karet, kopi, kelapa sawit, kakao dan Jambu Mete
27.	Pengembangan dan Diseminasi Inovasi Mendukung Pembangunan Pertanian
28.	Penerapan dan Pemanfaatan Prinsip Good Governance, Kebijakan dan Regulasi

Bab 8
**ANGGARAN PEMBANGUNAN
DEPARTEMEN PERTANIAN TAHUN 2007**



Bab 8

ANGGARAN PEMBANGUNAN DEPARTEMEN PERTANIAN TAHUN 2007

Untuk tahun 2007, anggaran Departemen Pertanian sebesar Rp. 8.789.618.068, yang akan dipergunakan untuk membiayai tiga (3) program utama dan dua (2) program pendukung, dengan rincian seperti pada Tabel 1 :

Tabel 1. Alokasi Anggaran Berdasarkan Program Pembangunan Pertanian Tahun 2007
(Rp. Ribu)

No.	PROGRAM	ANGGARAN
Program Utama		
1.	Peningkatan Ketahanan Pangan	3.256.368.909
2.	Pengembangan Agribisnis	2.188.984.981
3.	Peningkatan Kesejahteraan Petani	2.186.829.610
Program Pendukung		
4.	Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan	1.134.560.611
5.	Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	22.873.957
TOTAL		8.789.618.068

Dari total anggaran tahun 2007 tersebut diatas, alokasi anggaran berdasarkan jenis belanja dapat dilihat seperti dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2007

(Rp. Juta)

No.	JENIS BELANJA	ANGGARAN	%
1.	Pegawai mengikat	672.350,45	7,65
2.	Pegawai tidak mengikat	598.178,69	6,81
3.	Barang mengikat	295.605,62	3,36
4.	Barang tidak mengikat	2.800.141,96	31,86
5.	Belanja modal	1.036.156,34	11,79
6.	Bantuan Sosial	3.387.185,00	38,54
TOTAL		8.789.618,06	100,00

Jika dilihat dari alokasi anggaran untuk pusat dan daerah maka alokasi untuk daerah sebesar 79,42% dan di pusat 20,58% (Tabel 3).

Tabel 3. Alokasi APBN Departemen Pertanian Tahun 2007 antara Pusat dan Daerah

(Rp. Milyar)

URAIAN / TAHUN	ANGGARAN	%
Pusat	4,204,628.90	20,58
Daerah	4,584,989.17	79,42
TOTAL	8.789.618,07	100,00

*) Termasuk SP3 745 M dan Bantuan Bunga Kredit Investasi Pertanian (BKKIP) 500 M, Serta untuk bantuan Penanggulangan Bencana Alam 103 M, dan bantuan benih tanaman pangan Rp.1,047 triliun. Empat kegiatan tersebut nantinya di delevry ke daerah, sehingga Pusat memiliki alokasi anggaran hanya Rp.1.808.861,40 atau 20,58%

PENUTUP

Besarnya anggaran sangat penting dan tentunya berpengaruh pada pencapaian sasaran pembangunan pertanian. Namun perlu disadari bahwa yang lebih penting sesungguhnya adalah efektifitas dari pelaksanaan anggaran itu sendiri. Dengan demikian diperlukan kesungguhan dari pengelolah anggaran baik ditingkat pusat maupun di daerah untuk mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan ini pula maka koordinasi dan komunikasi yang intensif antara pusat, propinsi dan kabupaten/kota menjadi suatu hal yang sangat penting.

REFERENSI

1. Badan Pusat Statistik (BPS), 1999
2. Badan Pusat Statistik (BPS), 2006.
3. Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004 -2009.
5. Rencana Pembangunan Pertanian 2005 - 2009.
6. Rencana Strategis Departemen Pertanian 2005 - 2009.
7. Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE-546/MK.02/2006 tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2007